

7 Apartemen di Hong Kong Hangus Terbakar

Kebakaran besar di 7 blok apartemen Wang Fuk Court, Hong Kong, menewaskan 55 orang dan ratusan hilang. Api dipicu kelalaian perancah dan bahan busa saat renovasi. Hingga Kamis (27/11/2025) pagi, otoritas berhasil mengendalikan api di empat blok, sementara upaya pemadaman masih berlangsung di tiga blok lainnya. Rekaman video menunjukkan api masih menyembur dari setidaknya dua menara yang dibungkus perancah bambu dan jaring konstruksi hijau, dengan asap pekat membubung ke langit. Tampak, warga penghuni apartemen di Distrik Tai Po, Hong Kong menyaksikan api melalap tempat tinggalnya Rabu (26/11/2025) malam. Berita terkait baca hal.7. (Foto-foto: REUTERS.ist)

PURBAYA **ANCAM** BUBARKAN BEA CUKAI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melayangkan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bersih-bersih atau dibubarkan. Ia mengingatkan pola era Orde Baru ketika pengawasan kepabeanan diserahkan kepada SGS (Société Générale de Surveillance), bukan ke tangan negara. Langkah ini sebagai respon berbagai kecurigaan publik mengenai 'permainan' di lingkungan Bea Cukai. Ia menyebut dua jenis praktik yang kerap dituduhkan. Pertama, under-invoicing ekspor yaitu menurunkan nilai barang agar beban pajak lebih kecil. Kedua, lolosnya berbagai barang ilegal tanpa terdeteksi. Meskipun tidak bisa memastikan benar atau tidaknya semua tuduhan, namun persepsi publik terlanjur buruk. Salah satu pemicunya adalah pengakuan pedagang thrifting di Pasar Senen yang menyebut biaya meloloskan satu kontainer pakaian bekas ilegal bisa mencapai Rp 550 juta. Tahun lalu rapor Bea Cukai di mata masyarakat juga 'merah'. Dua kasus yang menonjol adalah bantuan Korsel berupa alat bantu untuk SLB di Indonesia ditahan Indonesia. Bahkan menetapkan biaya sebesar US\$ 22.846,52 atau sekitar Rp 361.039.239 untuk dibayarkan. Kasus viral lain datang dari kreator konten Radhika Althaf. Sepatu impor miliknya seharga Rp 10.301.000 dikenakan bea masuk sebesar Rp 31.801.343 atau tiga kali lipat lebih mahal dari harga belinya. Purbaya memberikan deadline setahun bagi Bea Cukai memperbaiki diri. Semoga.

BACA HAL 11...

**TOTAL NILAI:
RP249.3 TRILIUN**

Pencapaian ini 80,3% dari target APBN.
Pertumbuhan (YoY): 7,6% (Year-over-Year)

Bea Masuk
Rp41.0 Triliun ▼ 4,9%

Bea Keluar
Rp24.0 Triliun ▲ 69,2%

Cukai
Rp184.2 Triliun ▲ 5,7%

KONTROVERSI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC) PERIODE 2024-2025.

1. Korupsi Impor Gula – PT SMIP

- **Terungkap:** 2024
- **Pelaku:** Direktur PT SMIP (RD) & eks Kakanwil Bea Cukai Riau 2019-2021 (RR)
- **Modus:** Ubah laporan impor — gula kristal putih dilaporkan sebagai gula kristal mentah; ada pemberian/kemudahan dari pejabat Bea Cukai
- **Pasal:** Pasal 2(1) jo. Pasal 18 UU Tipikor; jo. Pasal 55(1) KUHP; subsidi Pasal 3(1)
- **Status:** RD & RR ditahan, berkas tahap II sudah diserahkan ke kejaksaan (Juli 2024)

2. Dugaan Pelanggaran Ekspor Turunan CPO – PT MMS

- **Terungkap:** 6 November 2025
- **Pelaku:** PT MMS (eksportir "fatty matter")
- **Modus:** Dokumen ekspor dilaporkan sebagai fatty matter bebas bea, padahal mengandung turunan CPO (berpotensi hindari bea keluar/lartas)
- **Nilai:** 87 kontainer disita, total 1.802 ton; nilai Rp28,7 miliar; potensi kehilangan penerimaan diduga lebih besar
- **Status:** Barang disita; kasus masih diselidiki DJBC & APH, berpotensi kena sanksi administratif atau pidana jika terbukti

**PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI PER OKTOBER 2025:**

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho memprediksi puncak arus mudik pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung sebanyak dua kali.

"Prediksi puncak itu ada dua kali. Prediksi puncak mudik pertama, itu tanggal 20 (Desember), dan prediksi puncak mudik kedua operasi lilin itu adalah tanggal 24 (Desember)," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Oleh karenanya, Korlantas akan menggelar Operasi Lilin mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Gelar pasukan menjelang operasi lilin akan dilakukan pada 19 Desember 2025.

"Karena nanti rangkaian untuk pergeseran yang menuju ke Trans Jawa dan Pelabuhan Merak, Lampung, itu mungkin akan mendahului," kata dia.

Maka dari itu, untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama masa puncak arus mudik Nataru, Korlantas Polri menggelar Operasi Lilin 2025 pada tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 2 Januari 2026.

Sedangkan untuk puncak arus balik Nataru, diprediksi terjadi tanggal 28 Desember 2025 dan tanggal 4 Januari 2026.

"Prediksi kami dengan stakeholder yang sudah kami rapat itu tanggal 28 Desember 2025, termasuk juga di penyeberangan, termasuk juga di jalan tol, termasuk jalan arteri, dan mudik arus balik yang kedua itu adalah tanggal 4 Januari 2026," jelas Agus.

Lebih lanjut dia menyebutkan pemerintah juga berencana menerapkan kebijakan WFA maupun WFH pada tanggal 29, 30, dan 31 Desember 2025 sehingga prediksi puncak arus balik pun bisa berubah.

Agus menambahkan ada empat klasterisasi pengamanan lalu lintas di dalam Operasi Lilin 2025.

Klaster pertama adalah jalur tol. Ia mengatakan bahwa kepolisian akan memastikan lalu lintas berjalan lancar di jalan tol, termasuk juga di jalan arteri, jalan provinsi, hingga jalan alternatif.

Klaster kedua adalah pelabuhan dan penyeberangan. Klaster ketiga adalah pusat keramaian, tempat wisata, dan tempat perayaan Tahun Baru 2026. Klaster terakhir adalah tempat ibadah.

2,9 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Di sisi lain, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara (Korlantas) Polri memprediksi jumlah kendaraan yang akan bepergian keluar Jakarta saat momen libur Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mencapai 2.915.318 kendaraan.

Catat! Puncak Arus Mudik Nataru 20 dan 24 Desember

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memprediksi puncak arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) akan berlangsung dua kali, yaitu tanggal 20 dan 24 Desember 2025 mendatang. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) maupun work from home (WFH) pada tanggal 22, 23, dan 24 Desember 2025, sehingga diprediksi terjadi pergeseran masyarakat pada tanggal-tanggal tersebut.



"Kami laporkan proyeksi volume lalin keluar nataru (Natal dan tahun baru). Proyeksinya 2.915.318 kendaraan," kata Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta,

Kamis (27/11/2025).

Agus menyebutkan, jumlah ini relatif lebih sedikit dibandingkan libur Hari Raya Idul Fitri 2025. Namun, jumlah ini meningkat 12 persen atau 255.669 kendaraan dari hari normal dan naik 0,6 persen atau 26.328 dari

momen libur Natal tahun 2024.

"Kalau prediksi nataru hanya ada peningkatan 12,2 persen (255.669 kendaraan) terhadap normal. Naik 0,9 persen (26.328) terhadap 2024," ucap Agus.

Agus memastikan, proyeksi kemacetan pada libur akhir tahun ini masih bisa dikendalikan dengan menerapkan skema one way (satu jalur) atau contraflow (lawan arus). (wid,ist,tmo/dya)

DISKON TARIF TOL NATARU 2025/2026

Berlaku: 22, 23, dan 31 Desember 2025
Besaran Diskon: 10-20% Total Ruas Tol: 26 ruas

- 2 ruas Jabodetabek
- 9 ruas Transjawa
- 3 ruas Nonjawa
- 12 ruas Transsumatra
(Rincian ruas diumumkan kemudian)

DISKON TRANSPORTASI (SKB 4 Menteri)

- Kereta Api (Diskon 30%)
Periode keberangkatan:
22 Des 2025 - 10 Jan 2026
- Kapal Laut (Diskon 20%)
Periode keberangkatan:
17 Des 2025 - 10 Jan 2026
- Penyeberangan (Diskon: Sesuai ketentuan)
Periode keberangkatan:
22 Des 2025 - 10 Jan 2026
- Pesawat (Diskon 13-14%)
Periode keberangkatan:
22 Des 2025 - 10 Jan 2026

Jakarta, tapi jumlahnya pasti akan lebih banyak dibandingkan tahun lalu," kata Suntana.

Pada periode Nataru 2024 lalu, Kemenhub menyediakan kuota 38.772 penumpang dan 2.320 unit sepeda motor melalui layanan bus, kapal laut, dan kereta api. Tahun ini, angka tersebut dipastikan meningkat untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat terhadap program mudik gratis.

Pemerintah akan mengumumkan jadwal, mekanisme pendaftaran. Serta titik keberangkatan resmi setelah seluruh detail teknis ditetapkan. (rri,ist/dya)

Pemerintah Siapkan Transportasi Gratis

PEMERINTAH memastikan kembali menggelar program mudik gratis pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Program ini dikoordinasikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Program ini disebut sebagai upaya menjaga kelancaran arus perjalanan sekaligus menekan potensi kecelakaan. Terutama bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana, mengatakan, skema mudik gratis tahun ini akan tetap mengacu pada pola tahun sebelumnya. Pemerintah menyiapkan fasilitas transportasi darat, laut, dan kereta api untuk mengangkut pemudik beserta sepeda motor ke berbagai daerah tujuan.

"Seperti tahun lalu, pemerintah melaksanakan mudik gratis bagi masyarakat. Baik yang menggunakan

bus di beberapa terminal maupun yang akan naik motor," kata Wamenhub dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

"Nanti ada kereta api dan pelabuhan yang akan mengangkut motor ke wilayah-wilayah tertentu untuk mengurangi kecelakaan di perjalanan," ujar Suntana.

Meski besaran kuota pemudik dan sepeda motor masih dalam proses penyelesaian, ia memastikan kapasitas yang disiapkan akan lebih besar dari tahun lalu. Program mudik gratis tidak hanya digelar oleh pemerintah pusat, tetapi juga akan didukung oleh berbagai pihak, termasuk BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jumlahnya tentu akan kita umumkan secara resmi, saya juga yakin selain dilaksanakan oleh pemerintah, teman-teman dari BUMN juga akan melakukan yang sama. Termasuk, Gubernur DKI

GUGATAN AGAR RAKYAT BISA PECAT ANGGOTA DPR DITOLAK

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang diajukan sejumlah mahasiswa. MK menolak mengubah pasal yang memungkinkan anggota DPR diberhentikan oleh pemilih dari dapilnya. Tak hanya itu, MK juga menolak permohonan uji materi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang meminta adanya pembatasan masa jabatan pengurus parpol maksimal dua periode.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) yang meminta aturan agar rakyat dapat memecat anggota parlemen.

"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," demikian putusan MK untuk permohonan nomor 199/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam persidangan di gedung MK, Kamis (27/11/2025).

MK mengatakan gugatan ini berkaitan dengan sistem pemilu di Indonesia. MK menyatakan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.

"Sehingga konsekuensi logis dari diterapkannya mekanisme recall terhadap anggota DPR dan anggota DPRD juga harus dilakukan oleh partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi perwakilan," ujar MK.

MK mengatakan keinginan para pemohon agar pemilih di dapil atau konstituen dapat mengusulkan pemberhentian anggota DPR dan anggota DPRD tak sejalan dengan UUD 1945. Selain itu, MK menyebut permintaan pemohon itu sama dengan menggelar pemilu ulang.

"Keinginan para Pemohon agar konstituen di daerah pemilihan diberi hak yang sama dengan partai politik sehingga dapat mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR dan anggota DPRD pada dasarnya tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan. Disamping itu, secara teknis hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan yang bersangkutan dan hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dipastikan pemilih yang pernah memberikan hak pilihnya kepada anggota DPR dan anggota DPRD yang akan diberhentikan pada waktu dilaksanakannya pemilihan umum," ujar MK.

MK juga menjawab kekhawatiran para pemohon soal pemberhentian anggota DPR oleh partai politik bisa berdampak pada dominasi partai dan tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Menurut MK, kekhawatiran tersebut tidak terjadi karena MK telah menegaskan dalam tiga putusan



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin sidang pembacaan putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/11/2025). (ant)

sebelumnya bahwa pergantian anggota DPR atau DPRD oleh partai tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum.

"Dalam hal ini, apabila pemilih menilai terdapat anggota DPR atau DPRD yang tidak layak menjadi anggota

DPR atau anggota DPRD, pemilih dapat mengajukan keberatan kepada partai politik bahkan dapat menyampaikan kepada partai politik untuk me-recall anggota DPR atau anggota DPRD dimaksud. Bahkan sesuai dengan regularitas waktu penyelenggaraan

MK Tak Kabulkan Pembatasan Masa Jabatan Pengurus Parpol

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang meminta adanya pembatasan masa jabatan pengurus parpol maksimal dua periode.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan perkara nomor 194/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

MK menyatakan permohonan yang diajukan oleh advokat bernama Imran Mahfudi itu tidak beralasan hukum. Menurut MK, dalil menghendaki pembatasan periodisasi masa jabatan pimpinan parpol sebagaimana organisasi advokat tidaklah tepat.

"Sekalipun organisasi advokat dan partai politik berada dalam ranah infrastruktur politik ..., keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda," tutur Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh membacakan pertimbangan hukum.

Dia mengatakan organisasi

advokat merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Organisasi advokat tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi lain, termasuk organisasi parpol.

Menurut MK, norma Pasal 22 UU Parpol yang mengamanatkan kepengurusan parpol di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah adalah upaya pembentuk undang-undang mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengisian kepengurusan.

"Dengan konstruksi norma Pasal 22 UU 2/2008 dimaksud, jalan untuk musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi pilihan pertama yang seharusnya dilakukan dalam proses pengisian kepengurusan partai politik," ujar Daniel.

Namun demikian, MK mengingatkan, amanat tersebut harus dituangkan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga (AD/ART) parpol. Selain itu, berbagai kemungkinan model

pemilihan, pemilih seharusnya tidak memilih kembali anggota DPR atau anggota DPRD yang dianggap bermasalah pada pemilu berikutnya," ujar MK.

Diberitakan, lima mahasiswa menggugat Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kelima Pemohon dalam Perkara Nomor 199/PUU-XXIII/2025 tersebut adalah Ikhsan Fatkhul Azis (Pemohon I), Rizki Maulana Syafei (Pemohon II), Faisal Nasirul Haq (Pemohon III), Muhammd Adnan (Pemohon IV), dan Tsalis Khoirul Fatna (Pemohon V). (dct,gus,ist/dya)

PROSEDUR PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPR

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tentang Tata Tertib

- Anggota DPR dicopot dari jabatannya karena meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- Anggota DPR diberhentikan, di antaranya jika:
 - Tidak melaksanakan tugas selama 3 bulan berturut-turut;
 - Melanggar sumpah jabatan dan kode etik DPR;
 - Melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun;
 - Atau diberhentikan oleh partai politik.
- Pimpinan partai politik mengusulkan pemberhentian ke Pimpinan DPR.
- Pimpinan DPR menyampaikan usulan ke Presiden untuk memperoleh peresmian.
- Anggota DPR yang diberhentikan digantikan oleh calon dengan urutan suara berikutnya pada hasil pemilu pada daerah yang sama, melalui mekanisme penggantian antarwaktu (PAW).

MEKANISME PENGANTIAN ANTARWAKTU (PAW)

- Pimpinan DPR meminta calon pengganti kepada KPU (sesuai poin 5).
- KPU melakukan verifikasi berkas calon pengganti kemudian menyampaikan nama calon pengganti ke Pimpinan DPR.
- Pimpinan DPR menyampaikan ke Presiden.
- Presiden mengesahkan calon pengganti sebagai anggota DPR.
- Anggota pengganti diambil sumpah/janjiny



pengisian kepengurusan parpol juga harus diatur secara eksplisit dalam AD/ART.

"Pada titik itu, ruang untuk melakukan perbaikan proses pengisian partai politik dapat dilakukan oleh setiap anggota dalam perumusan materi atau substansi anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga partai politik," katanya. (ant,wid/dya)

BANJIR DAN LONGGSOR LUMPUHKAN ACEH, SUMUT HINGGA SUMBAR

Sekitar 43 Warga Meninggal dan 88 Hilang

Banjir bandang dan tanah longsor melumpuhkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyebabnya cuaca ekstrem yang dipicu Siklon Tropis Senyar. Berdasarkan laporan Polda Sumut, pada hari Kamis (27/11) pukul 12.30 WIB, tercatat 212 korban jiwa yang terdiri dari 43 meninggal dunia, 81 luka-luka dan 88 warga masih dalam pencarian.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue) atau Basarnas menggelar delapan operasi terkait bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Terkait bencana yang disebabkan oleh hidrometeorologi ini, kita menggelar delapan operasi yang ada di wilayah Sumatera, baik itu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," jelas Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii dalam konferensi pers, Kamis (27/11/2025).

"Kemudian terkait dengan kekuatan yang ada, tentunya esensi bersama-sama seluruh potensi yang ada di wilayah saat ini sedang berjuang, sedang melaksanakan operasi, khususnya mengevakuasi korban yang masih terisolasi," tambahnya.

Kedua, kata Syafii, Basarnas juga telah mengerahkan kekuatan-kekuatan dari kantor-kantor SAR yang tidak terdampak bencana tersebut, untuk dikirim ke lokasi terdampak bencana.

"Begitu juga dari Badan SAR Nasional yang ada di Basarnas Special Group juga kita kirim, baik itu menggunakan sarana laut maupun sarana darat," kata dia.

Namun, lanjut Syafii, saat ini sejumlah akses jalur darat terputus akibat bencana banjir dan longsor, sehingga pihaknya menggunakan jalur laut.

"Saat ini memang jalur darat beberapa titik masih terputus, sehingga kita mengerahkan dengan fasilitas jalur laut," tegasnya.

"Kemudian terkait dengan jumlah korban, tentunya Kantor SAR untuk mem-broadcast jumlah korban tentunya tidak sama dengan yang ada di wilayah, karena Kantor SAR ini meng-cover beberapa wilayah kabupaten/kota," tuturnya.

Oleh sebab itu, ia berharap agar daa jumlah korban tidak dijadikan sebagai bahan perdebatan.

221 Kejadian Bencana di Sumut

Sumatera Utara (Sumut) juga dilanda bencana longsor dan banjir sejak 24 November hingga hari ini 27 November 2025. Penyebabnya cuaca ekstrem yang dipicu Siklon Tropis



Jembatan Gunung Nago putus akibat banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Kamis (27/11/2025). Foto: Dok. BPBD

Senyar.

Berdasarkan laporan Polda Sumut, pada hari Kamis (27/11/2025) pukul 12.30 WIB, tercatat 212 korban yang terdiri dari 43 meninggal dunia, 81 luka-luka dan 88 warga masih dalam pencarian.

"Gelombang bencana ini mengakibatkan 212 korban terdiri

dari 43 meninggal dunia, 81 luka-luka serta 88 orang masih dalam pencarian," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/11/2025).

Ferry menuturkan laporan ini berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan Kapolda Sumut kepada

Kapolri, pada hari Kamis (27/11/2025).

"Tercatat 221 kejadian bencana meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang hingga puting beliung di 12 kabupaten/kota," ujar Ferry.

Ferry menjelaskan laporan terkini menunjukkan bertambahnya empat wilayah terdampak, yaitu Langkat, Padangsidimpuan, Nias Selatan, dan Serdang Bedagai.

"Polda Sumut saat ini menunggu dukungan helikopter Mabes Polri untuk mempercepat pengiriman bantuan serta evakuasi khususnya ke lokasi-lokasi yang tidak dapat dijangkau kendaraan darat," pungkasnya.

Hujan dengan intensitas tinggi juga mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), sejak Kamis (27/11/2025) dini hari memicu bencana hidrometeorologi di banyak titik. Banjir, longsor, dan pohon tumbang melanda sejumlah kelurahan, memaksa tim gabungan melakukan penanganan darurat sejak pagi.

Salah satu lokasi terparah terjadi di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, ketika banjir bandang menerjang permukiman warga yang berada di bantaran Sungai Minturun. Arus deras membawa material lumpur dan batang pohon, merusak rumah-rumah yang berada di jalur aliran air.

Empat warga dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 04.00 WIB tersebut. (wid,ant,ist/dya)

Benarkah Tambang Jadi Penyebabnya? Ini Kata Walhi



Kondisi terkini banjir dan longsor landa 11 kabupaten /kota di Sumut. Foto: Dok. Istimedia

BENCANA hidrometeorologi seperti banjir hingga tanah longsor me-nerjang sejumlah daerah pulau Sumatera dalam beberapa hari terakhir, termasuk Sumatera Utara. Banjir dan tanah longsor ini diakibatkan salah satunya oleh guyuran hujan. Namun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) setempat menyebut bahwa bencana ini juga diakibatkan oleh aktivitas manusia.

Bencana banjir dan tanah longsor terus meluas di pulau Sumatera. Di

Provinsi Sumatera Utara, bencana alam ini setidaknya berdampak ke 13 kabupaten/kota berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) setempat pada Kamis (27/11/2025). Hingga Rabu (26/11/2025) malam, 34 korban meninggal dunia akibat bencana ini.

Sedangkan di Sumatera Barat, hingga Rabu, banjir dan tanah longsor berdampak ke 13 kabupaten/kota, menurut laporan pemerintah provinsi setempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi setempat melaporkan, 9 orang menjadi korban jiwa bencana ini hingga Kamis siang.

Berikutnya di Aceh, 20 dari 23 kabupaten/kota provinsi setempat terendam banjir, berdasarkan laporan

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada Kamis. Bencana hidrometeorologi ini juga telah menelan korban jiwa sebanyak 13 orang.

Walhi Sumatera Utara mengeluarkan rilis pada Rabu (26/11/2025) perihal bencana banjir terutama Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kota Sibolga.

Walhi Sumatera Utara dalam rilisnya itu menyebut, banjir di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir tidak hanya diakibatkan guyuran hujan semata. Di samping itu, kerusakan alam menjadi faktor lain penyebab banjir.

"Saat banjir tiba terlihat banyak kayu-kayu terbawa air dan jika melihat dari teknologi misalnya citra satelit, dapat dilihat kondisi hutan yang gundul di sekitar lokasi bencana. Hal ini menunjukkan bahwa campur tangan manusia turut menyumbang terjadinya bencana," tulis Walhi Sumatera Utara dalam rilisnya.

"Dalam kondisi inilah bencana tidak hanya dikaitkan dengan keadaan alam secara murni, akan tetapi menjelma menjadi bencana ekologis," lanjut Walhi Sumatera Utara. (wid,ant/dya)

2 HARI USAI REHABILITASI, EKS DIRUT ASDP BELUM JUGA BEBAS

Mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspawati belum bebas hingga Kamis (27/11/2025). Padahal, sudah 2 hari berlalu usai keputusan mendapatkan rehabilitasi dari Presiden RI Prabowo Subianto diumumkan pada Selasa (25/11/2025) lalu. Alasannya, KPK belum menerima Surat Keputusan (SK) Rehabilitasi yang ditandatangani Prabowo hingga saat ini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut SK tersebut merupakan dasar atas proses rehabilitasi terhadap Ira dan dua mantan Direktur ASDP, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono.

"Sampai saat ini KPK belum menerima surat keputusan tersebut yang tentunya menjadi dasar proses untuk melaksanakan rehabilitasi ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis.

Menurutnya, meski keputusan rehabilitasi telah diumumkan secara luas. Proses pembebasan belum bisa dilakukan karena seluruh prosedur administratif harus dipenuhi terlebih dahulu.

"Para pihak masih di rutan KPK. Sehingga kami masih menunggu surat tersebut untuk kemudian bisa melaksanakan tindak lanjutnya," kata Budi.

KPK menegaskan akan menjalankan proses sesuai aturan dan tidak mengambil langkah apapun sebelum menerima salinan SK rehabilitasi. Hingga berita ini dibuat, tiga mantan direksi ASDP masih mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan bahwa lembaga itu tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi keputusan Presiden. Keputusan itu terkait pemberian rehabilitasi kepada Dirut ASDP Ira Puspawati dan dua terdakwa lainnya.

Tanak menjelaskan, kewenangan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 14, Presiden diberikan hak untuk menerbitkan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangan Mahkamah Agung, serta pertimbangan DPR.

"Hak prerogatif Presiden tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain karena kekuasaan itu diberikan langsung oleh UUD 1945. Untuk memastikan Presiden dapat menjalankan tugasnya secara efektif," kata Tanak dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).

Sementara itu, tim kuasa hukum Ira dan kawan-kawan yang dipimpin



Suami Ira Puspawati, Zaim Uchrowi, menjenguk Ira di rutan pada Kamis (27/11/2025). (ist)

oleh Soesilo Aribowo juga sudah bolak balik untuk mengurus pembebasan.

Sama dengan KPK, Soesilo menyatakan tim kuasa hukum belum menerima SK rehabilitasi tersebut.

"Belum (bisa keluar), menunggu surat," kata Soesilo saat menjenguk Ira di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Suami Ira Puspawati, Zaim Uchrowi mengatakan hingga kini juga

Pakar Sebut Intervensi Hukum Prabowo Terlalu Jauh

KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada tiga terpidana kasus korupsi PT ASDP menuai sorotan tajam. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferri Amsari, menilai langkah tersebut sebagai bentuk intervensi yang melewati batas terhadap proses hukum dan berpotensi buruk bagi penegakan supremasi hukum di tanah air.

Ferri Amsari secara tegas menyatakan bahwa seorang presiden seharusnya tidak memberikan ruang untuk memaafkan terduga pelaku kejahatan, terutama dalam perkara korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa.

"Kalau dilihat kebanyakan presiden dalam setahun menggunakan kewenangan dia mengampuni bagi orang yang menjalani proses hukum cukup banyak dan itu terkesan berupaya mengintervensi hukum terlalu jauh," kata Ferri, Kamis (27/11/2025).

Langkah "pengampunan" ini bukan yang pertama kali dilakukan

oleh Prabowo. Ferri menyoroti adanya pola serupa dalam satu tahun terakhir, di mana Presiden menggunakan kewenangannya dalam kasus-kasus besar lainnya.

Sebelumnya, Prabowo juga telah memberikan abolisi kepada Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula, serta amnesti untuk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap.

Menurut Ferri, jika memang ada masalah dalam proses penegakan hukum, solusi yang seharusnya diambil presiden adalah dengan memperbaiki kinerja aparat di bawahnya, bukan dengan "mengoreksi" putusan pengadilan.

"Bagi saya, harusnya presiden kalau memang ada problematika dalam penyelenggaraan hukum, harusnya memperbaiki kinerja anak buahnya. Bukankah polisi, jaksa, dan KPK sekarang berdasarkan undang-undang adalah bawahan presiden?" kata Ferri.

belum mendapat kepastian mengenai waktu kebebasan Ira.

Zaim juga mengaku tidak mengetahui perihal proses administrasi untuk mengeluarkan istrinya dari Rutan KPK. (tin, ini, ist, dya)

12 Dosa Ira Puspawati di Kasus ASDP Menurut KPK

1. Mengubah Anggaran Tiba-tiba:

Ira disebut mengubah rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dari yang semula untuk pembangunan kapal baru menjadi akuisisi perusahaan pelayaran.

2. Studi Kelayakan Abal-abal:

Proses akuisisi sebuah perusahaan diduga kuat tidak didasari oleh penyusunan feasibility study (studi kelayakan) yang memadai dan komprehensif.

3. Abaikan Risiko Tinggi:

"Keempat, mengabaikan penilaian risiko meskipun aksi akuisisi berisiko tinggi," ujar Budi. 4. Patok Harga dan Kongkalikong: Nilai akuisisi PT Jembatan Nusantara diduga telah dipatok dan dikondisikan bersama pemilikannya, Adjie, yang kini juga berstatus tersangka.

5. Intervensi Hasil Valuasi:

Ira dituding meminta pihak konsultan untuk menyesuaikan hasil valuasi agar sesuai dengan harga yang telah dipatok sebelumnya.

6. Beri Data Tidak Akurat:

KPK menyebut Ira memberikan data yang tidak akurat kepada konsultan, termasuk informasi mengenai status kapal yang ternyata banyak yang tidak beroperasi.

7. Tutup Mata Soal Utang dan Kondisi Kapal:

"Ketujuh, tidak mempertimbangkan utang PT JN, kondisi kapal, biaya perbaikan, dan utang pajak," sebut Budi.

8. Paksaan Akuisisi Meski Keuangan Cekak:

Ira diduga memaksakan proses akuisisi meskipun kondisi finansial ASDP saat itu tidak mampu, yang berujung pada pengajuan pinjaman ke bank.

9. Abaikan Masukan BPKP:

Masukan krusial dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai penilaian harga kapal yang dianggap terlalu tinggi, diabaikan begitu saja.

10. Beli Kapal Rongsok:

"Sepuluh, membeli kapal yang tidak layak jalan dan tidak sesuai standar Organisasi Maritim Internasional atau IMO serta, beberapa kapal tidak diasuransikan, dan izin yang belum lengkap," tutur Budi.

11. Salah Baca Kondisi Pasar:

Keputusan akuisisi juga tidak mempertimbangkan kondisi bisnis penyeberangan yang sudah jenuh, di mana jumlah suplai kapal lebih banyak dari permintaan konsumen.

12. Pengaruhi Konsultan untuk Berbohong:

"Terakhir, memengaruhi konsultan untuk memberikan keterangan yang mendukung skenario tertentu," ujar Budi.

Meskipun ada dissenting opinion, Ferri Amsari tetap memandang langkah rehabilitasi oleh Presiden sebagai preseden berbahaya. Ia khawatir tindakan ini akan menjadi pukulan telak bagi independensi yudikatif dan semangat pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Dosen UIN Sunan Kalijaga, Gugun El Guyanie, menjelaskan pemberian rehabilitasi itu membuat Ira dkk dianggap tak

Renovasi Rumdin Wawali Malang 2026, Rp2 Miliar Disiapkan



Rumah dinas Wakil Wali Kota Malang. (Santi/Lentera)

Sudah lama sekali tidak dilakukan renovasi," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, Kamis (27/11/2025).

Renovasi yang akan dilakukan tidak berupa rombak total. Dandung menegaskan, pekerjaan yang akan dilakukan hanya menyesuaikan ruang

dan penggantian beberapa bagian yang diperlukan pada bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Dieng No 16 Kota Malang itu.

"Nggak ada rombak total. Penyesuaian nanti. Penyesuaian ruangan, penggantian," katanya. Ia juga memastikan tidak ada penambahan lantai atau bangunan

baru. "Nggak. Tetap lantai satu," ucapnya.

Besarnya anggaran renovasi dipastikan akan fokus pada pekerjaan fisik bangunan. Dandung menegaskan, anggaran tersebut tidak digunakan untuk pembelian meubeler. "Gedung fisik. Murni untuk itu," tegasnya ketika disinggung mengenai penyebab besarnya anggaran.

Dandung menyebut, selama pengerjaan renovasi, Wawali Kota Malang kemungkinan akan menempati rumah pribadinya untuk sementara waktu. "Kalau Pak Wakil Wali Kota, memang harus pindah dulu. Ya, ada kemungkinan menempati rumah pribadi," katanya.

Dandung juga menjelaskan, selain rumdin Wawali, pihaknya juga mengalokasikan anggaran senilai Rp400 juta untuk renovasi rumah dinas Wali Kota, di Jalan Ijen Nomor 2, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Menurut Dandung, perbaikan ini akan difokuskan pada bagian atap yang belum pernah mendapatkan pemeliharaan dalam waktu lama.

Selain anggaran Rp2 miliar untuk renovasi rumah dinas Wakil Wali Kota,

Dinas PUPR-PKP juga mengalokasikan anggaran dalam RAPBD 2026 untuk kebutuhan lain. Di antaranya Rp5,5 miliar untuk pembangunan permanen Jembatan Sonokembang. Serta Rp1,6 miliar untuk pembangunan jaringan air minum di Perumahan PNS Bandulan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, turut menjelaskan kondisi rumah dinas yang dinilai kurang memadai untuk menerima tamu. Menurutnya, tata letak bangunan membuat ruang pertemuan berada pada jalur yang sama dengan kamar utama.

"Banyak tamu-tamu yang terkadang merasa sungkan karena tempatnya untuk ruang pertemuan satu jalur dengan kamar utama, itu kadang membuat masyarakat sungkan masuk," ujarnya.

Ali menilai desain bangunan yang ada saat ini belum mendukung fungsi rumah dinas sebagai tempat menerima tamu resmi. Pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya proses penganggaran dan teknis renovasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. (Santi/Dya)

MALANG - Tahun 2026 rumah dinas (Rumdin) Wakil Wali (Wawali) Kota Malang bakal direnovasi, setelah tidak tersentuh perbaikan besar selama satu dekade. Pemerintah Kota (Pemkot) menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar dalam RAPBD tahun depan

"Anggaran untuk renovasi rumah dinas Wakil Wali Kota itu Rp2 miliar. Itu memang sudah perlu renovasi.

Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Malang Tembus 91,66 Persen, 5 Jenis Lampau Target

MALANG- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang mencatat, hingga minggu keempat November 2025, lima dari 12 jenis pajak daerah telah melampaui target. Sementara realisasi keseluruhan mencapai 91,66 persen.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, menyampaikan lima jenis pajak yang sudah menembus target tersebut meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman, PBJT jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"PBJT makanan dan minuman tercapai 108,92 persen, PBJT jasa kesenian dan hiburan 101,13 persen, pajak reklame 100,02 persen. Kemudian pajak air tanah 104,16 persen, dan PBB 103,73 persen," ujar Made, Kamis (27/11/2025).

Selain lima jenis pajak yang telah melampaui target, Bapenda juga mencatat progres signifikan pada beberapa jenis pajak lainnya. Berdasarkan data per minggu keempat November 2025, realisasi total dari 12

jenis pajak daerah mencapai 91,66 persen dari target.

Menurutnya, angka ini naik dari realisasi awal November yang berada di posisi 84,72 persen. Dijelaskannya, total target 12 jenis pajak daerah tahun ini sebesar Rp730.200.171.372. Dari jumlah tersebut, realisasi sementara mencapai Rp669.272.854.832.

"Memang belum seluruhnya melampaui target, tetapi sejumlah jenis pajak yang dikelola itu susah berada pada tren kenaikan yang stabil," katanya.

Untuk PBJT jasa perhotelan, Made menyebutkan, realisasi mencapai Rp7.497.470.088 atau 90,58 persen dari target Rp8.276.724.151. PBJT makanan dan/atau minuman bahkan melebihi target dengan realisasi Rp20.452.661.469 dari target Rp18.778.240.386.

Pada PBJT jasa kesenian dan hiburan, realisasi tercatat Rp8.115.455.461 atau 101,13 persen dari target Rp8.025.000.000. Pajak reklame juga telah memenuhi target dengan capaian Rp4.930.408.216 atau

100,02 persen dari target Rp4.929.291.120.

Sementara itu, PBJT tenaga listrik baru mencapai 77,38 persen dengan realisasi Rp118.685.758.902 dari target Rp153.373.412.210. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) juga masih berada di angka 90,38 persen dari target Rp870.825.412.

Pada PBJT jasa parkir, realisasi hingga November mencapai Rp1.169.608.875 atau 73,64 persen dari target Rp1.588.295.198. Di sisi lain, pajak air tanah sudah menembus target dengan realisasi Rp7.284.816.072 dari target Rp6.993.810.697.

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), realisasi juga melampaui target dengan capaian Rp118.898.299.370 atau 103,73 persen dari target Rp114.621.487.422. Adapun BPHTB baru mencapai 89,66 persen dengan realisasi Rp173.601.759.778 dari target Rp193.631.752.794.



Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara. (dok. Ist)

Dari sektor opsen PKB dan BBNKB, realisasi masing-masing mencapai 94,32 persen dan 96,23 persen dari total target yang ditetapkan. Made menyampaikan pihaknya tetap optimis mampu mencapai atau bahkan melampaui target hingga akhir tahun..(Santi/Dya)

KEBAKARAN PALING MEMATIKAN LANDA HONG KONG: 55 TEWAS, 2 DIANTARANYA WNI

Kebakaran yang melanda tujuh gedung apartemen di Distrik Tai Po, Hong Kong, yang terjadi sejak Rabu (26/11/2025), merupakan insiden kebakaran paling mematikan yang terjadi di wilayah tersebut. Hingga Kamis (27/11/2025) pukul 14.00 WIB atau nyaris 24 jam setelah kebakaran terjadi, setidaknya 55 orang tewas. Dikabarkan 3 korban di antaranya berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

Kemlu RI mengungkapkan dua WNI tewas dalam kebakaran hebat yang menimpa Apartemen Wang Fuk Court di Hong Kong. Hal ini terungkap usai koordinasi intensif antara KJRI Hong Kong dengan Hong Kong Police Force (HKPF).

"Dari hasil koordinasi intensif KJRI Hong Kong dengan Hong Kong Police Force (HKPF), diperoleh informasi hingga saat ini, 2 orang WNI dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka," kata Kemlu dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

Kemlu mengatakan, baik korban tewas maupun korban luka merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Semua korban merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik," ungkap Kemlu.

Kemlu menyebut KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan pihak terkait lainnya untuk memantau perkembangan situasi dan memberikan pendampingan lanjutan kepada WNI yang terdampak, termasuk penyediaan tempat tinggal sementara dan logistik pada gedung KJRI Hong Kong.

"KJRI Hong Kong telah menghubungi keluarga WNI terdampak guna menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam serta memberikan kejelasan informasi sekaligus menginformasikan langkah penanganan selanjutnya. KJRI juga terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan agen ketenagakerjaan setempat guna pengurusan repatriasi jenazah serta hak-hak terkait," pungkaskan Kemlu.

Data lain disampaikan Sringatin, salah satu koordinator di jaringan pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Dia menyebut setidaknya 7 pekerja Indonesia di apartemen itu hingga kini hilang dan belum diketahui kondisinya.

Terdapat 155.000 pekerja migran Indonesia di Hong Kong, per Desember 2024, menurut KJRI.

"Kami masih menggalang data dan berkoordinasi dengan teman-teman pekerja dari Indonesia," kata Sringatin. "Kami masih mengumpulkan alamat penampungan sementara dan akan berkunjung ke sana," ujarnya lewat pesan teks.

Kesaksian Warga

Jumlah korban jiwa yang tercatat

Petugas pemadam kebakaran memadamkan kebakaran yang terjadi sejak hari Rabu di Wang Fuk Court. Tampak kompleks perumahan di distrik Tai Po, Wilayah Baru Hong Kong, tersebut hangus, Kamis (27/11/2025). (AP)



saat ini sudah melampaui jumlah korban kebakaran hebat di Sham Shui Po pada Agustus 1962, yang menewaskan 44 orang dan menyebabkan ratusan lainnya

kehilangan tempat tinggal di kota tersebut. Dalam kejadian tahun 1962 itu, sekitar 22,7 kilogram kembang api yang disimpan lokasi kejadian menyebabkan api menyebar dengan

cepat ke lantai atas, menurut South China Morning Post kala itu.

Pada November 1996, kebakaran di Gedung Garley di Kowloon menewaskan 41 orang dan melukai 81 orang lain.

Kebakaran paling mematikan di Hong Kong terjadi pada tahun 1948. Saat itu kebakaran dipicu ledakan di lantai dasar sebuah gudang lima lantai yang berisi "barang berbahaya". Kebakaran tersebut menewaskan 176 orang.

Salah satu warga Kiko Ma, bercerita selama lebih dari setahun jendela apartemen di apartemen Wang Fuk Court telah disegel karena menjadi bagian dari proyek renovasi. Ma berkata, warga terkadang menemukan puntung rokok di dekat jendela, yang mereka duga ditinggalkan oleh pekerja konstruksi. (ap,rtr,ist,bbc/dya)

3 Orang Ditangkap Atas Dugaan Pembunuhan

Seorang petugas pemadam termasuk di antara korban tewas. (reuters)



OTORITAS Hong Kong menangkap tiga orang dari perusahaan konstruksi buntut insiden kebakaran besar di kompleks hunian Wang Fuk Court.

Kepala Polisi Hong Kong Eileen Chung mengatakan tiga orang tersebut terdiri dari dua direktur dan satu konsultan teknik.

Chung tidak mengidentifikasi nama ketiga orang itu. Ia hanya mengatakan mereka ditangkap atas "dugaan pembunuhan".

Pemerintah sementara itu menyebutkan kontraktor yang terdeta sebagai pihak penanggung jawab bangunan, yaitu Prestige Construction dan Engineering

Company.

Kebakaran terjadi di sebuah kompleks apartemen di Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, pada Rabu (26/11/2025). Api menjalar dengan cepat dan melalap gedung-gedung yang masih dalam tahap pembangunan tersebut.

Sebanyak 55 orang tewas dalam kebakaran ini hingga

Kamis (27/11/2025).

Mantan Kepala Divisi Bangunan di Hong Kong Institute of Engineers, Tony Za, mengatakan jaring yang terbakar kemungkinan merupakan penyebab api menyebar dengan cepat.

Jaring tersebut biasanya terbuat dari serat dan plastik. Jaring biasa dipakai untuk menjaga agar material konstruksi dan objek-objek lain tidak jatuh dari perancah bambu.

Di Hong Kong, perancah bambu sering dipakai saat merenovasi bangunan, terutama bagian

eksterior.

Bahan jaring mestinya tidak mudah terbakar. Kontraktor di Hong Kong harus memiliki sertifikat untuk memastikan hal itu.

Namun, melihat dari video kebakaran yang beredar, Za tidak dapat memungkiri bahwa jaring pada konstruksi bangunan tampaknya tidak memenuhi standar, demikian dikutip dari New York Times.

Presiden China Xi Jinping buka suara usai kebakaran dahsyat menghancurkan tujuh apartemen di Tai Po, Hong Kong pada Rabu (26/11/2025). Hong Kong merupakan bagian dari wilayah China, yang memiliki otonomi khusus.

Dalam pernyataan resmi, Xi menyampaikan bela sungkawa untuk keluarga korban dan mereka yang terdampak insiden kebakaran ini. Xi juga menyerukan upaya penyelamatan semaksimal mungkin.

"[Saya menginstruksikan tim] melakukan segala yang mungkin dalam pencarian dan penyelamatan, merawat yang terluka, dan menghibur keluarga korban," kata Xi dalam laporan Xinhua. (rtr,ist/dya)

Jangan Dibuang! 4 Kulit Buah Ini Bergizi dan Aman Dikonsumsi

Banyak orang terbiasa membuang kulit buah tanpa berpikir panjang. Padahal, sejumlah jenis kulit buah menyimpan kandungan gizi yang tak kalah tinggi dibanding daging buahnya. Mulai dari vitamin, mineral, antioksidan, hingga serat alami, bagian yang sering dianggap sampah dapur ini ternyata bisa mendukung pola makan sehat dan minim limbah (zero waste).

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, para ahli gizi mulai mendorong masyarakat untuk mengenali manfaat kulit buah—tentu dengan syarat kebersihannya terjamin dan cara pengolahannya tepat.

Kulit buah rentan terpapar pestisida atau bakteri, sehingga kebersihan menjadi faktor penting. FDA (Food and Drug Administration) merekomendasikan mencuci produk segar dengan air mengalir selama sekitar 30 detik sambil digosok perlahan. Meski tidak menghilangkan residu sepenuhnya, langkah ini dapaturunkannya secara signifikan. Data EPA menunjukkan bahwa sisa pestisida pada kulit buah umumnya berada dalam batas aman untuk konsumsi. Berikut beberapa jenis kulit buah yang aman dimakan dan bernutrisi tinggi.

Kulit Mangga

Kulit mangga kaya vitamin C dan E serta mengandung serat dalam jumlah tinggi. Penelitian yang dikutip dari Real Simple menyebutkan bahwa 10 gram kulit mangga dapat menyediakan 36–78 gram serat. Kulit mangga sangat kaya serat makanan. Dalam beberapa varietas, komposisi serat dapat mencapai

ai 16–28% untuk serat larut dan 29–50% untuk serat tak larut. Vitamin C di kulit mangga juga sangat tinggi (nilai bisa bervariasi berdasarkan varietas mangga).

Selain itu, ada vitamin E (sekitar 205–509 µg/g pada kulit mangga matang) yang juga signifikan. Mineral seperti kalsium (Ca), kalium (K), magnesium (Mg), besi (Fe), dan lainnya juga ditemukan dalam jumlah lebih tinggi di kulit dibandingkan daging mangga. Senyawa bioaktif seperti polifenol, karotenoid, serta triterpen/triterpenoid juga cukup dominan di kulit mangga.

Ada bukti bahwa ekstrak kulit mangga memiliki sifat antikanker: beberapa riset in vitro (tabung) menunjukkan kemampuan menghambat pertumbuhan sel tumor. Kulit mangga juga mengandung triterpen dan triterpenoid yang berpotensi antidiabetik.

Karena potensinya, para peneliti pangan bahkan tengah mengeksplorasi pembuatan bubuk kulit mangga untuk campuran roti, pasta, hingga jeli. Namun, sebagian orang bisa mengalami reaksi alergi terhadap kulit mangga, sehingga perlu dilakukan tes atau konsumsi bertahap untuk memastikan keamanannya.

Kulit Pisang

Kulit pisang banyak dimanfaatkan sebagai bahan masakan di beberapa negara. Kulit ini kaya serat larut, antioksidan, dan nutrisi mikro penting. Selain direbus untuk dihaluskan sebagai bahan smoothies, kulit pisang juga dapat diolah menjadi berbagai camilan atau masakan lain setelah teksturnya dilunakkan terlebih dahulu.

Kulit pisang mengandung serat kasar yang cukup tinggi; dalam satu kajian, kadar serat kulit pisang bisa mencapai

~17,12% (serat kasar) dari beratnya. Vitamin B6 dan B12 juga ditemukan dalam jumlah signifikan di kulit pisang. Mineral seperti kalium (potassium) dan magnesium juga terkandung dalam kulit pisang.

Dengan kandungan seratnya, kulit pisang bisa membantu sistem pencernaan, meredakan sembelit dan memperlancar buang air besar. Dalam perawatan kecantikan, kulit pisang dapat digunakan untuk menutrisi kulit dan rambut: misalnya, potasium membantu menjaga hidrasi kulit, sedangkan antioksidan bisa memperkuat folikel rambut. Vitamin B6 & B12 dalam kulit pisang juga berfungsi dalam menjaga kesehatan kognitif dan fungsi saraf.

Kulit Kiwi

Kiwi sudah dikenal baik untuk kesehatan pencernaan, namun manfaatnya lebih maksimal bila dikonsumsi bersama kulitnya. Studi menunjukkan konsumsi dua buah kiwi per hari dapat membantu meningkatkan frekuensi buang air besar dan meredakan sembelit ringan. Jika tidak menyukai tekstur kulit kiwi hijau yang berbulu, kiwi gold bisa menjadi pilihan karena kulitnya lebih halus. Konsumsi kiwi gold beserta kulitnya bahkan dapat meningkatkan asupan serat hingga 50 persen.

Meski teksturnya berbulu atau agak kasar, terutama untuk kiwi hijau biasa, ada versi kiwi “gold” atau kiwiberry yang kulitnya lebih halus dan lebih nyaman dikonsumsi.

Asupan serat yang meningkat dari kulit kiwi membantu fungsi pencernaan, memperlancar buang air besar, dan mendukung mikrobiota usus. Antioksidan dari kulit kiwi bisa melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif. Beberapa ahli juga menyebut

bahwa serat larut dari kulit kiwi dapat membantu mengelola kadar kolesterol dan glukosa darah melalui efek prebiotiknya.

Kulit Semangka

Bagian putih pada kulit semangka mengandung citrulline, senyawa yang membantu mengatur tekanan darah, serta kaya antioksidan, kalsium, kalium, magnesium, dan zat besi. Di beberapa wilayah Amerika Selatan, kulit semangka diolah menjadi acar dan menjadi hidangan favorit.

Rind semangka juga mengandung mineral seperti kalium, magnesium, kalsium, dan zat besi, yang berkontribusi pada fungsi metabolik tubuh yang penting. Selain itu, terdapat antioksidan di bagian ini, yang membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif. (ist, gus, wol/dya)



Olahlah Kulit Secara Tepat

Kulit mangga

bisa dikeringkan dan digiling menjadi tepung, lalu digunakan dalam pembuatan roti, pasta, atau jeli.

Kulit pisang

bisa direbus, dibuat smoothie, atau dijadikan masker untuk kulit/rambut.

Kulit kiwi

bisa dimakan mentah (jika terasa nyaman) atau dicampur ke dalam salad buah.

Kulit semangka

bisa dijadikan acar, dimasak, atau dikonsumsi sebagai snack setelah diolah.

CHIP ANALOG CHINA DIKLAIM SERIBU KALI LEBIH KENCANG DARI NVIDIA DAN AMD

Peneliti di China dilaporkan berhasil mengembangkan chip analog yang dapat bekerja hingga 1.000 kali lebih cepat dibanding GPU kelas atas saat ini, termasuk produk keluaran Nvidia dan AMD. Chip analog di sini adalah chip yang mampu melakukan proses komputasi langsung melalui rangkaian fisiknya, tanpa mengandalkan sistem pemrosesan digital biner seperti prosesor dan GPU modern.

Penelitian terkait chip tersebut dipublikasikan dalam jurnal Nature Electronics, dan menyebut bahwa teknologi baru ini juga mampu mengatasi masalah “turun-temurun” dalam sistem komputasi analog, seperti akurasi rendah dan masalah implementasi praktis selama lebih dari satu abad.

Selain unggul dalam kecepatan, chip AI analog buatan ilmuwan China ini juga disebut sangat efisien.

Dalam risetnya, para peneliti menjelaskan bahwa perangkat tersebut dapat mencapai presisi setara prosesor digital, namun hanya menggunakan 1 persen energi dari konsumsi daya chip digital konvensional, seperti Nvidia H100.

Peningkatan efisiensi energi ini diperoleh karena chip memproses data langsung di dalam perangkat kerasnya, sehingga mengurangi kebutuhan transfer data dan konsumsi daya secara signifikan. Chip ini dirancang menggunakan arsitektur baru dan memanfaatkan sel memori RRAM (Resistive Random-Access Memory) sebagai bagian dari sistem komputasinya.

Teknis utama yaitu menggunakan susunan memori RRAM dengan arsitektur crossbar, yang memungkinkan pemrosesan matriks besar, seperti pembalikan matriks skala besar, langsung di ranah analog. Desain ini diklaim mampu mencapai presisi setara 24-bit fixed-point dalam komputasi analog, sesuatu yang selama ini menjadi kendala besar di teknologi komputasi analog.

Dalam pengujian, untuk tugas tertentu seperti perhitungan matriks

MIMO pada sistem nirkabel, chip ini mampu memberikan performa hingga 1.000 kali lebih cepat sekaligus menggunakan sekitar 100 kali lebih sedikit energi dibanding GPU digital teranggih saat ini.

Teknologi ini juga mengatasi von Neumann bottleneck, yaitu hambatan akibat perpindahan data antara memori dan prosesor, dan menawarkan pendekatan baru terhadap arsitektur komputasi di level perangkat keras. Para ilmuwan menilai chip analog ini sangat relevan dengan tantangan teknologi masa depan, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data dalam jumlah besar, seperti kecerdasan buatan dan teknologi 6G.

“Dengan semakin banyaknya aplikasi yang memakai data dalam jumlah besar, hal ini menjadi tantangan bagi komputer digital tradisional, terlebih ketika skala perangkat semakin sulit dikembangkan,” ujar tim peneliti, dikutip dari TheNews.

Selama ini, Nvidia dan AMD mendominasi pasar komputasi AI dengan GPU berperforma tinggi. Jika chip analog buatan ilmuwan China ini dapat diproduksi secara massal dan diadopsi luas, maka lanskap teknologi komputasi AI dapat mengalami perubahan drastis.

Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal produksi komersial atau rencana implementasi industri dari teknologi chip analog buatan China ini.

Diketahui, Pemerintah Tiongkok memblokir penjualan cip AI Nvidia dan memerintahkan pembatalan pesanan

karena beberapa alasan strategis yang saling berkaitan. Langkah ini merupakan respons terhadap pembatasan ekspor teknologi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, serta bagian dari ambisi Tiongkok untuk mencapai swasembada teknologi.

Tiongkok menuduh Nvidia melanggar undang-undang antimonopoli negara melalui akuisisi perusahaan teknologi Israel, Mellanox Technologies. Temuan ini dilaporkan oleh Administrasi Negara untuk Pengaturan Pasar (SAMR). Pihaknya juga mengkhawatirkan bahwa cip Nvidia, terutama model tertentu, mungkin dilengkapi dengan sistem pelacakan yang dapat membahayakan keamanan nasional. Kekhawatiran ini sejalan dengan usulan anggota

parlemen AS.

Diketahui, Amerika Serikat telah lama membatasi penjualan cip AI canggih oleh perusahaan seperti Nvidia ke Tiongkok. Kebijakan ini muncul dari kekhawatiran bahwa teknologi komputasi berperforma tinggi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penelitian militer, sistem persenjataan otonom, dan kemampuan intelijen Tiongkok. Dengan pembatasan tersebut, AS berupaya menghambat laju kemajuan teknologi strategis Tiongkok, sekaligus menjaga dominasi Amerika dalam pengembangan kecerdasan buatan, superkomputasi, serta inovasi pertahanan. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas, di mana kontrol terhadap teknologi canggih dianggap sebagai salah satu kunci utama dalam mempertahankan pengaruh global dan keamanan nasional. (kum,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Kurma Park, Destinasi Wisata Halal yang Edukatif di Pasuruan

Gelembung pertumbuhan pariwisata halal terus membesar, bahkan menurut laporan Global Muslim Travel Index (GMTI), data dari Mastercard-CrescentRating, sektor wisata halal global diperkirakan mencapai lebih dari \$300 miliar pada tahun 2026, dengan Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam pasar ini setelah Malaysia dan Uni Emirat Arab. Di Jawa Timur, salah satu yang kini menjadi jujugan adalah Kurma Park. Berada di Desa Karanglo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, lokasinya mudah terjangkau, hanya sekitar 20 menit dari exit tol Pandaan

Menjejakkan kaki di lokasi, suasana kebun Kurma langsung disajikan. Deretan pohon kurma dengan daunnya yang menghijau menjadi pemandangan menonjol di tengah area ladang dan sawah penduduk.

Setelah memasuki gerbang, pengunjung bisa memilih beberapa alat transportasi yang disewakan. Ada sepeda listrik, andong/dokar hingga mobil safari. Hal ini wajar mengingat luasnya lahan yang bisa dijelajahi sekitar 5,3 Hektar (Ha). Namun bagi yang ingin berjalan kaki, pengunjung bisa mengikuti rute dan penunjuk arah ke wahana-wahana yang ingin di tuju.



"Kurma Park ini mulai dibuat 2016. Di tahun itu pohon kurma masih berukuran kecil, ada

yang besar merupakan kurma _dongkelan_ (memindahkan dari lokasi lain, Red). Saat itu saya sedang menjalankan ibadah Haji, terus Bapak saya Alm. H. Moch. Roeslan memberi kabar kalau sedang menanam kurma. Lah.. Kami kami pun kaget, saat itu belum terfikirkan mau dibuat wisata kayak ini, "ujar owner Kurma Park, Hj. Rusti Widayati SE.

Seiring makin banyaknya pohon kurma dan berhasil dibuahkan, pertama kali Kurma Park dibuka untuk umum yaitu 1 Januari 2017. "Awal luas lahan saat pertama dibuka yaitu 3,7 Ha, Kemudian di tahun-tahun berikutnya ada pengembangan terus-menerus menjadi 6,3 Ha saat ini, " jelasnya.

Diceritakan Wida--begitu sapaan akrabnya-- sang ayah memiliki ide membuat kebun kurma saat berkunjung ke Thailand. Di sana dilihat kurma bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. "Nah cuaca dan kondisi di Thailand dan Indonesia kan tidak berbeda jauh. Akhirnya Bapak mencoba menanamnya. Tentu tidak langsung berhasil, karena banyak hal yang harus disesuaikan terutama kondisi tanah, " katanya. Selain lahan yang terus berkembang, nama destinasi inipun diakui mengalami beberapa kali perubahan. Awal pembukaan menggunakan na 'Duta Wisata Kebun Kurma', kemudian

adanya pengembangan berubah menjadi 'Wisata Kebun Kurma'. Dengan fasilitas makin lengkap dan menjadi destinasi wisata halal skala nasional, namanya kini makin dikenal sebagai 'Kurma Park'.

Berbicara jumlah pengunjung iakunya ada _season_ tertentu yang membuat Kurma Park kebanjiran pemesanan tempat. "Kami punya paket manasik haji, baik until edukasi anak sekolah maupun untuk latihan grup dari travel haji dan umrah. Habis Ramadan tahun ini misalnya, sudah ada pemesanan untuk beberapa sekolah. Saat momen tersebut, pengunjung kami mencapai ribuan, " jelasnya.

Dalam paket manasik, pengunjung akan mendapatkan semua fasilitas yang ada di wahana. Terutama yang berkaitan dengan manasik yaitu sudah disiapkan miniatur Kabah lengkap dengan terowongan mina hingga bukit shofa-marwah. Suasana Arab Saudi tentunya makin terasa karena pengunjung berjalan dikelilingi pohon-pohon kurma. "Kami membebaskan pengunjung, apakah mau paket makanannya dari sini atau bawa sendiri. Kalau konsumsi disediakan Kurma Park, tentu kami memberikan fasilitas lebih salah satunya sertifikat, "katanya.

Sementara, kunjungan juga akan ramai saat liburan panjang termasuk momen lebaran. Meskipun demikian, Wida menegaskan, saat puasa Kurma Park tutup satu bulan penuh.

"Selama bulan puasa

Kurma Park tutup. Tapi jangan khawatir, kami buka lagi pas H plus 1 lebaran. Bisa jadi pilihan saat libur lebaran," ujanya. Diketahui, Saygon Waterpark dan Saygon Hotel&Cottage berada di bawah manajemen yang sama dengan Kurma Park.

Kurma Park Pasuruan juga terkenal sebagai wisata edukasi kurma pertama di Indonesia. Sebagai tumbuhan khas yang berasal dari daratan Afrika dan Timur Tengah, menanam kurma di Indonesia bisa dikatakan hal yang langka. Pengunjung bisa melihat pohon kurma dari 10 jenis berbeda. Mulai dari kurma ajwah, kurma barhee, kurma lulu, medjol, sultana, khalas, golden, thailand, sukari, hingga kiara.

Selain pohon kurma kebun ini juga ditanami berbagai jenis pohon khas Timur Tengah seperti siwak, tin, zaitun, hingga delima. Banyak juga tanaman dari berbagai daerah seperti matoa, anggur pohon, alpukat aligator, dan aneka jenis durian, aneka kelengkeng, hingga siwalan.

"Semua jenis kurma di sini bisa berbuah. Terutama yang kultur jaringan karena teknologi sudah terbaru. Usia 3 -5 tahun sudah berbuah," katanya. Sementara untuk lohon dongkelan biasanya dibeli dari kampung-kampung saat usia 7 tahun dan sudah bisa berbuah setiap tahun.

Panen raya biasanya saat bulan Agustus setiap tahunnya. Di bulan-bulan lain, tetap ada pohon yang berbuah meskipun tidak serentak.

Saat ini ada sekitar 592 pohon kurma. (dya)



Purbaya Ancam ...dari hal 1

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Direktorat Jenderal Bea Cukai terancam dibekukan karena kinerja yang kurang memuaskan di mata pimpinan tertinggi negara hingga masyarakat.

Hal ini seiring dengan banyaknya masalah yang tengah disoroti publik, seperti tidak ada pengawasan bea cukai di bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), hingga bocornya impor beras ilegal 250 ton melalui Sabang, Aceh.

"Kita akan bereskan. Jadi Bea Cukai, saya sudah panggil mereka kita rapat internal ya. Kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki," tegasnya kepada awak media di kompleks parlemen, Kamis (27/11/2025).

Purbaya sudah meminta waktu untuk membenahi Bea Cukai selama 1 tahun kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, terdapat ancaman bahwa Ditjen Bea Cukai dapat dibekukan, sehingga nasib 16.000 karyawan berada di ujung tanduk.

"Saya bilang ke mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Saya biarkan, saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman serius," ungkapny.

Pemerintah, kata dia, membuka potensi masalah kepabeanan dan cukai di Indonesia dialihkan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), layaknya kebijakan pada masa Orde Baru.

Pada saat itu, Presiden ke-2 Soeharto sempat membekukan Ditjen Bea Cukai pada tahun 1985 karena banyaknya praktik pungli dan penyelundupan. Pembekuan dilakukan hingga tahun 1995.

"Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS. Seperti zaman dulu lagi," jelas Purbaya.

Dengan demikian, Purbaya memastikan para pegawai Bea Cukai telah memahami ancaman yang mengintai mereka, sehingga semangat untuk berbenah. Salah satunya dengan peningkatan sistem digital di seluruh kantor Bea Cukai untuk mengantisipasi penyelewengan.

"Sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sudah aman, artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional," tuturnya.

"Karena gini saya bilang, kalau kita

gagal memperbaiki nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan," imbuh Purbaya.

Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan, pada tahun 1968, Menteri Keuangan saat itu, Ali Wardhana, mengendus banyak penyelewengan dan korupsi di Ditjen Bea dan Cukai, karena kongkalikong antara Bea Cukai dan importir penyelundup.

Kemudian, setelah berdiskusi dengan para menteri dan mendapat penilaian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan

Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.

Soeharto mempercayakan sebagian wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada PT Surveyor Indonesia yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan swasta asal Swiss bernama Societe Generale de Surveillance (SGS).

Kewenangan itu kemudian dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan diberlakukan secara efektif pada 1 April 1997, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Kepabeanan .(wid,ant/dya

Blusukan dan Kecurigaan Purbaya

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan sikap tegas dalam membenahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah itu mengemuka setelah muncul pengakuan pedagang thrifting di Pasar Senen yang menyebut biaya meloloskan impor pakaian bekas ilegal dapat mencapai Rp 550 juta per kontainer melalui pelabuhan.

Pernyataan tersebut turut menyeret dugaan keterlibatan oknum pegawai DJBC. Menanggapi hal itu, Purbaya meminta pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut untuk datang langsung membawa bukti konkret agar bisa ditindaklanjuti.

"Orang bisa ngomong apa saja, belum tentu betul. Harus diklarifikasi lagi betul apa enggak," ujar Purbaya saat ditemui di The Westin Jakarta, Kamis (20/11/2025) lalu.

Menurut dia, validasi bukti menjadi kunci agar penindakan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tidak menghukum pihak yang tidak terlibat. Ia menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi keras jika terdapat bukti kuat mengenai praktik pelanggaran oleh pegawai Bea Cukai.

"Kalau ada tuduhan itu coba record-nya mana? Saya akan tindak langsung. Kalau cuma ngomong-ngomong saja kan enggak benar kaya gitu, itu namanya fitnah. Kalau ada buktinya, saya akan eksekusi

langsung," tegasnya.

Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Kemenkeu termasuk di lingkungan Bea dan Cukai agar menjaga integritas dan menghindari praktik yang merugikan negara.

Sikap tegas Purbaya tidak hanya berhenti pada respons terhadap laporan pedagang. Ia juga terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa proses pengawasan impor.

Salah satu inspeksi terbaru dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak serta Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya, Selasa (11/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Purbaya menemukan kejanggalan nilai impor yang dilaporkan.

Salah satu contohnya adalah barang berupa submersible pump (pompa air terbenam) yang tercatat hanya seharga 7 dollar AS atau sekitar Rp 117.000 (kurs Rp 16.700 per dollar AS). Nilai tersebut jauh di bawah harga pasar.

Padaahal, menurut pengecekan Purbaya di marketplace, barang serupa dijual dengan harga mencapai Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per unit. Perbedaan mencolok inilah yang menurutnya menjadi indikasi jelas adanya praktik underinvoicing atau pelaporan nilai impor yang jauh lebih rendah dari harga sebenarnya.

Temuan itu, kata Purbaya, semakin menguatkan urgensi

LANJUTAN DARI HAL 1...

Peningkatan dan lonjakan kasus penyelundupan/narkotika & barang ilegal — aktivitas penindakan 2024–2025

- Tahun 2024: DJBC mencatat 4.029 kasus penyelundupan/penindakan — estimasi potensi kerugian negara ~ Rp 38,3 miliar.
- Tahun 2024: Cegah 7,4 ton narkoba masuk Indonesia (sabu, ekstasi, ganja, dan lainnya).
- Tahun 2025: (per Januari–Juli) tercatat 14.657 penindakan, nilai barang ~ Rp 4,3 triliun.
- Hingga September 2025: di wilayah Kanwil Jateng-DIY, tercatat 2.955 penindakan; nilai barang ~ Rp 255,53 miliar; potensi kerugian negara diselamatkan ~ Rp 127,49 miliar.

Dugaan pelanggaran ekspor komoditas turunan CPO — PT MMS

- Terungkap: 2025 (pengungkapan resmi 6 November 2025).
- Pelaku / pihak terlibat: PT MMS — eksportir pelapor komoditas "fatty matter".
- Dugaan pelanggaran: Pelaporan dokumen ekspor "fatty matter" (seharusnya barang bebas bea) padahal barangnya mengandung produk turunan CPO — sehingga berpotensi elak dari bea keluar ekspor / lartas.
- Nilai barang/kerugian: 87 kontainer disita, berat total 1.802 ton, nilai barang ~ Rp 28,7 miliar. Namun estimasi potensi kehilangan penerimaan (karena under-invoicing, misclassification dsb.) disebut bisa jauh lebih besar — mekanisme perhitungan terus diperdalam.
- Status terakhir (Nov 2025): Barang disita, kasus masih dalam tahap penyelidikan / penelitian lebih lanjut oleh DJBC + aparat penegak hukum; kemungkinan dikenakan sanksi administratif atau pidana jika terbukti pelanggaran.

pembenahan tata kelola impor dan pengetatan pengawasan. Ia menekankan pentingnya memastikan transparansi nilai barang masuk demi mencegah distorsi pasar dan persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha dalam negeri.

Meski demikian, Purbaya tetap memberikan apresiasi kepada jajaran Bea dan Cukai yang telah menjalankan tugas dengan profesional dalam menjaga pasar dari barang ilegal dan praktik curang impor. Ia menilai sebagian besar pegawai tetap bekerja secara integritas dan menjadi garda depan dalam melindungi ekonomi nasional.

Pemerintah, tegasnya, berkomitmen memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki prosedur pemeriksaan, serta memastikan setiap pelanggaran ditindak secara tuntas. (wid,ist/dya)

KALA PBNU TEGASKAN PEMBERHENTIAN SAH, GUS YAHYA INGIN ISLAH

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tegaskan bahwa surat edaran pemberhentian Gus Yahya merupakan dokumen resmi hasil keputusan Syuriah. Kepemimpinan PBNU sementara berada di bawah Rais Aam. Katib Syuriah, KH Sarmidi Husna memastikan Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 adalah sah dan berlaku. Termasuk poin yang menyatakan status KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengatakan Yahya Cholil Staquf ingin islah di internal pengurus organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

KH. Yahya Cholil Staquf, dipecat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) per Rabu, 26 November 2025. Namun, surat edaran pemecatan Gus Yahya belum bisa dibubuhi stempel digital.

Katib Syuriah PBNU KH. Sarmidi Husna mengatakan terdapat kendala teknis dalam pembubuhan stempel. Meski demikian, Sarmini menekankan Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani Wakil Rais Aam, KH. Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriah, KH. Tajul Mafakhir adalah benar dan sah.

"Cuma memang ada kendala teknis, sehingga surat tersebut belum dapat distempel digital, secara digdaya itu belum bisa distempel digital. Makanya yang nyebar adalah surat yang masih ada tulisan darftnya. Sebenarnya surat itu adalah benar dan sah," kata Sarmidi dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, (27/11/2025).

Sarmidi menuturkan surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Hasil Rapat Harian Syuriah pada Kamis, 20 November 2025 yang di antaranya keputusannya sudah beredar. Yakni berupa risalah hasil rapat harian Syuriah PBNU.

Di antara keputusannya adalah bahwa, pertama KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari, terhitung sejak diterimanya Keputusan Rapat Harian Syuriah. Jika dalam waktu tiga hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Jabatan Ketua Umum PBNU.

"Karena tempo waktu tiga hari sudah dilalui, maka surat edaran menjadi penting untuk menjelaskan yang intinya adalah Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus



Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Nur Hidayat (kiri) dan Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Sarmidi Husna (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/11/2025). (ist)

sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB," ungkap Sarmidi.

Kini, kepemimpinan PBNU

sepenuhnya berada di tangan Rais Aam, selaku Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama, sampai ditetapkannya Pj. Ketua Umum. Bila

Mencuat Indikasi TPPU Mardani H Maming Rp100 Miliar

SEBUAH dokumen audit internal PBNU tahun 2022 beredar dan mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam pengelolaan keuangan organisasi, termasuk indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Audit menyebut dana sebesar Rp100 miliar, yang seharusnya digunakan untuk rangkaian HUT ke-100 PBNU dan operasional, justru masuk ke salah satu rekening Bank Mandiri atas nama PBNU.

Meski atas nama organisasi, audit menyebut rekening tersebut "dikendalikan oleh Mardani H. Maming", yang saat itu menjabat Bendahara Umum PBNU. Dana Rp100 miliar itu disebut berasal dari Grup PT Batulicin Enam Sembilan milik Maming.

"Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa dana sejumlah Rp

100 miliar yang masuk ke rekening Bank Mandiri atas nama PBNU pada tanggal 20 Juni 2022 dan 21 Juni 2022 dalam empat kali transaksi adalah berasal dari Grup PT Batulicin Enam Sembilan milik Mardani H. Maming," tulis dokumen tersebut, dikutip Rabu (26/11/2025).

Dana itu diketahui masuk hanya dua hari sebelum Mardani H. Maming diumumkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) saat ia menjabat Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

"Pada tanggal 22 Juni 2022, Mardani H. Maming diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu," tulis audit.

Gus Yahya keberatan atas putusan itu, bisa menyampaikan melalui mekanisme Majelis Tahkim PBNU.

"Konflik internal bisa diselesaikan Majelis Tahkim sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal PBNU," terang Sarmidi. (tmo,ist,ant/dya)

JEJAK ALIRAN UANG MARDANI H. MAMING KE PBNU

◦ TEMUAN AUDIT

Audit KAP GPAA menemukan dugaan aliran Rp100 miliar dari Grup Batulicin Enam Sembilan milik Maming ke rekening Bank Mandiri PBNU yang dia kendalikan. Ada indikasi TPPU.

◦ RINCIAN DANA MASUK (20-21 JUNI 2022)

Total Rp100 miliar:
- 20 Juni: Rp20 m + Rp30 m
- 21 Juni: Rp35 m + Rp15 m

◦ ALIRAN DANA LAIN

- Rp5,035 miliar dari Gus Gufan
- Dana MWL untuk R20: Rp26,86 m + Rp25,77 m
- Semua tercatat sebagai penerimaan PBNU.

◦ PENGELUARAN BESAR (REKENING DIKENDALIKAN MAMING)

- **28 Juni 2022:** Rp10 miliar (operasional Ketum PBNU + bayar hutang)
- **30 Juni 2022:** Rp10 miliar (operasional + kegiatan R20)
- **20 Juli:** Rp15 miliar ke Ra Gopong (Achmad Ghufon Sirodj)
- **23 Agustus:** Rp13,06 miliar (R20, IPNU-IPPNU, NU Online, LTM)
- **26 Aug-1 Sep:** Rp22 miliar ke Sumantri (Bendahara PBNU)
- **3 Oktober:** Rp6,23 miliar (R20 ke-2)
- **19 Okt-3 Nov:** Rp25 miliar (Ansor & R20)
- **7 November:** Rp11,86 miliar ke Truist Financial Corporation, AS 5 &
- **19 Des:** Rp20 miliar ke Sumantri
- **Total pembayaran hutang:** Rp77 miliar

◦ DANA UNTUK TIM HUKUM MAMING

Rp10,58 miliar lewat rekening Abdul Hakam untuk membentuk tim hukum & pendampingan kasus Maming. Ada memo Ketum PBNU (22 Juni 2022).

Audit juga mencatat adanya aliran dana keluar dari rekening Mandiri tersebut, termasuk pengeluaran lebih dari Rp10 miliar yang dibukukan sebagai pembayaran hutang. Selain itu, terdapat transfer signifikan sepanjang Juli-November 2022 ke rekening milik Abdul Hakam, Sekretaris LPBHNU, yang saat itu aktif menjadi bagian tim pendamping hukum Maming berdasarkan memo internal Ketua Umum PBNU tanggal 22 Juni 2022.

"Ini bukan hanya menunjukkan buruknya tata kelola keuangan PBNU, melainkan juga yang lebih berbahaya berpotensi membawa institusi Nahdlatul Ulama ke dalam persoalan hukum yang sangat serius, yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," tulis dokumen tersebut. (ini,ist/dya)